

1130198011

**REKONSTRUKSI KASUS PENCULIKAN
(Pengantar Untuk Menilai Persidangan 11 Anggota
Kopassus)**

KONTRAS
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

JAKARTA
22 DESEMBER 1998

Pengantar

Tanggal 23 Desember besok, pemerintah akan mulai mengadili 10 anggota Kopassus yang dituduh melakukan tindakan penculikan terhadap sejumlah aktivis. Persidangan ini, bisa dipandang sebagai kelanjutan berbagai upaya pemerintah dalam menuntaskan kasus penculikan pasca DKP (Dewan Kehormatan Perwira), yang dengan mekanisme tersendiri telah “menyelesaikan” soal keterlibatan Let.Jen. TNI. Prabowo, Mayjen. Muchdi dan Kolonel Chaerawan.

Dalam kacamata politik resmi, persidangan ini bisa dianggap sebagai puncak soal penculikan. Di mana di dalamnya legitimasi dan justifikasi atas hukum diletakan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian segala hal ihwal yang menyangkut penculikan –yang melibatkan begitu banyak pihak dalam institusi-institusi resmi negara- bisa dianggap diselesaikan dan tak lagi perlu dipersoalkan. Singkatnya, dengan persidangan itu, kasus penculikan akan ditutup layarnya dengan memendam misteri dan tanda tanya besar mengenai korban dan pertanggung jawaban politik serta kemanusiaan di dalamnya.

Dengan melihat kapasitas siapa-siapa yang disidangkan, dan sikap pemerintah dalam merespon soal yang belum selesai – misalnya soal ke mana 14 (?) orang yang masih hilang- maka jelaslah, publik perlu dengan segera dan secara tepat mendefinisikan apa sebenarnya persidangan ini. Apakah persidangan itu secara substansial memang berkesesuaian dengan perkara yang sebenarnya. Dan apakah dengan persidangan itu, soal yang sebenarnya bisa diselesaikan.

Untuk mengajak publik secara bersama-sama mengapresiasi serta menilai dan mendefinisikan persidangan itu dalam perspektif kemanusiaan dan pertanggung jawaban, maka KONTRAS mengajukan semacam eksposisi.

BAB I

Rekonstruksi Kasus Penculikan

Kasus orang hilang, bergerak dari desas-desus menjadi masalah publik setelah solidaritas dan keprihatinan muncul terekspresi secara konkret dengan tumbuhnya keberanian sementara kalangan sipil, untuk melaporkan soal itu secara resmi dan mengumumkannya kepada masyarakat luas. Tanpa dimulai dengan keberanian itu, kasus itu selamanya hanya akan menjadi desas-desus. Pengalaman masa lampau, secara jelas membuktikan kenyataan bahwa desas-desus selamanya mengandung bahaya besar: desas-desus mengenai teror akan melahirkan atau merupakan teror itu sendiri, dan setiap teror berarti meluasnya wilayah ketakutan dalam masyarakat. Menghentikan desas-desus, berarti menghentikan teror kepada diri sendiri. Kenyataan ini juga dikuatkan dengan mulai munculnya, satu demi satu laporan mengenai penculikan setelah satu kasus itu dibuka. Setelah itu, satu demi satu, seperti permainan menyusun gambar (puzzlle), gambar yang utuh satu demi satu tersusun, dan soal menjadi makin jelas hari-demi hari.

Kejelasan hari demi hari itu, bergerak seiring persilangan atau dinamika dalam relasi publik versus negara. Setiap respon publik yang divakili organisai—organisasi, keluarga korban maupun korban sendiri, melahirkan respon-respon dari negara, juga demikian sebaliknya. Dan “untungnya”, secara struktural Indonesia mulai memaski babak terberat dalam krisis yang dialaminya, sehingga beban dalam tubuh negara agaknya memang semakin berat, sehingga mau tak mau pergumulan soal orang hilang dengan publik domestik yang didukung oleh publik internasional itu, mendesak negara sedemikian rupa hingga menguak kasus ini, secara persis.

Keseluruhan dinamik itu secara sederhana bisa tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I: Rekonstruksi Kasus Penculikan Menurut Media Massa.

Tanggal	Sumber	Subyek	Isi	Konteks
23 02 98	Kompas	Ratna (SIAGA)	Hilangnya Desmon dan Pisu seharusnya sudah diketahui oleh Polisi karena sebelumnya (21-2) ia sudah melaporkan ke Da'I bachtiar dan Kuldiph Singh melaporkan ke Resort Jak Pus tanggal 10 februari 1998.	
20 2 98	Kompas	Da'i Bactiar	Tanggal 19 ia mengatakan bahwa Polri akan tangapi laporan orang hilang.	
25 02 98	Sinar Pagi	PBHI	Surati PANGAB soal hilangnya dua aktivis	
30 03 98	Kompas	HM Arief Makhya	Anaknya Andi Arief diculik,	
31 03 98	ADIL	ADIL	Penangkapan Andi Arief (tanggal 26 Naret) oleh aparat yang tidak jelas. Sebelumnya, tanggal 14 Maret Aan, Mugiyanto dan Nezar sudah diculik dari rusun Klender.	
1 04 98	Angkatan Bersenjata	Andul Wahab	Tidak benar ABRI	
		Mokodongan (Kapuspen)	terlibat kasus orang hilang.	
13 04 98	Merdeka	Kapuspen Abdul Wahab Mokodongan	Jangan negatif thingking terhadap ABRI, bisa saja	

			orang-orang yang dikabarkan hilang itu sedang jalan-jalan di hutan karena psing mikirin ekonomi..”	
14 04 98	ADIL	YLBHI	Mengirim surat ke PBB untuk kasus orang hilang.	
15 04 98	Jawa Pos	YLBHI	Mengirim surat ke badan PBB	
16 04 98	MI	Komnas HAM	Komnas akan mencek ulang soal orang hilang.	
17 04 98	Republika	YLBHI dan Muladi	YLBHI membentuk komisi untuk orang hilang. Muladi mengatakan resolusi untuk Indonesia harus dicegah. PBB mengecam kasus otrang hilang di Indnesia.	
20 04 98	Kompas	Haryanto taslam	Setelah hilang sekitar 40 hari sejak 2 Maret, Haryanto dikabarkan berkumpul kembali dengan keluarganya.	
22 04 98	Kompas	Andi Arief	Bersedia mengungkapkan kisah penculkana. Polisi mengaku mennahan Andi sejak 29 Maret. Ia dinyatakan hilang sejak tanggal 28. Dalam	

			ceritanya Andi menghaku mengetahui di mana Feisal Reza, Waluya jati dan Herman Hendrawan.	
27 04 98	S. Pemb	Pius	Mengungkapkan penculikannya sejak 4 Februari hingga 3 April.	
14 04 98	Merdeka	Hartono (mendagri)	ABRI berkewajiban mencari orang hilang, tapi ABRI Tidak bertanggung jawab atas orang hilang "wong ilang karepe dewe kok"	
15 04 98	Jayakarta	Polda Metro jaya	Pisu dinyatakan ditemukan dalam keadaan sehat di Palembang . Hal ini dijelaskan oleh Edward Aritonan.	
4 05 98	Kompas	Hendardi	Pembentukan TPF oleh ABRI hendaknya melibatkan kalangan LSM.	
25 05 98	Kompas	Desmon	Memberikan keterangan soal penculikan di depan TPF ABRI di kantor YLBHI.	
5 06 98	MI	Waluyo jati	Ungkap kasus penculikannya.	
9 06 98	Merdeka	Aan, Nezar, Mugyanto	Ungkap kasus penculikannya dan meminta perlindungan jaminan keamanan di	

			YLBHIL.	
19 06 98	Kompas	Korban	Mengadu ke ICRC	
26 06 98	Kompas	TPF ABRI	Ajak saksi korban merekonstruksi hal ihwal penculikan mereka.	
28 06 98	Kompas	KSAD dan Reza	KSAD mengatakan bahwa "kita jangan saling curiga. Jika ada apa-apa harus punya bukti" Sementara di Kantor YLBHI korban penculikan Reza menceritakan peristiwa penculikannya.	
25 06 98	Suara Karya	Presiden BJ. Habibie	Menginstruksikan agar ABRI menuntaskan kasus orang hilang.	
18 06 98	Kompas	Kontras	Keluarga korban gagal bertemu F-ABRI di DPR.	
1 07 98	Pik Rakyat	Pangab	Mengakui keterlibatan oknum ABRI dalam kasus orang hilang, namun kesalahan itu hanya bersifat kesalahan prosedur.	
3 07 98	S Karya	Puspom	Puspom telah memeriksa 40 orang sehubungan kasus orang hilang, termasuk sejumlah anggota ABRI dan telah	

			didentifikasi dari kesatuan mana. Namun Puspon tidak mengungkap siapa-siapa 40 orang yang dimaksud.
4 09 98	Kompas	Kontras	Andi Arief segera dibebaskan dari tahanan Polda.
4 07 98	Mi	Kontras dan Komnas	Penyidikan kasus orang hilang oleh puspom lambat, seharusnya sebelum 40 orang itu diproses (tidak semuanya ABRI), korban yang masih diculik dibebaskan terlebih dahulu.
08 07 98	Jak Pos	Kontras	Mengundang badan PBB Untuk membantu kasus orang hilang.
10 07 98	MI	Puspom	Ada Pamen terlibat kasus penculikan, nama pamen tersebut akan diumumkan oleh PANGAB. Selain itu saksi untuk kasus ini telah bertambah menjadi 43 orang dari ABRI dan sipil.
12 07 98	Kompas	PANGAB	Wiranto menolak menjelaskan siapa yang memberi perintah BKO kepada Prabowo. Sebelumnya ketua DKP

			menjelaskan bahwa pimpinan ABRI tidak pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan penculikan. Apa yang dilakukan Prabowo adalah hasil analisis BKO.	
14 07 98	Kompas	TPF ABRI melalui kapuspen	Dalam kasus penculikan ada oknum Kopassus terlibat.	
15 07 98	Kompas	Puspom	Tujuh orang anggota Kopassus ditahan. Tindakan ini disebut luar biasa oleh Marzuki Darusman.	
16 07 98	MI	Kadispenad Brigjen I Dewa putu Ray	TPF yang diketuai Mayjend Syamsu, dapat meminta keterangan Prabowo, namun harus seijin panglima ABRI. Di tempat lain Kapuspen syamsul Ma'arif mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan terhadap Prabowo.	
	Kompas	Syamsu Djalal	Kasus penculikan ini adalah pil pahit bagi ABRI.	

	Republika S. Karya	Syamsu Kapolda	Penyelidikan mengarah ke pimpinan satuan elit. Andi Arief dibebaskan Selasa malam. (setelah diserahkan ke polisi pada tanggal 17 April setelah disekap (sejak 28 maret 1998)
17 07 98	Bisnis Indonesia	Pangab	Oknum Kopassus bertindak di luar batas kepatutan, yang melampaui petunjuk atasan dan kesalahan prosedur.
	MI	Syamsu	Penculikan atas perintah pimpinan Kopassus
17 07 98	Jayakarta	Marzuki darusman	Mengusulkan pembentukan DKM untuk kasus penculikan.
21 07 98	MI	KSAD	Dewan Kehormatan Perwira (DKM) di ABRI sudah ada dan akan berfngsikalau ada perwira yang melanggar. (kapsul Syamsul Ma'arif mengatakan bahwa DKM untuk kasus

			orang hilang sedang digodok)	
23 07 98	Republika	Danpsupom	Para aktivis yang diculik disekap di Cijantung. 12 korban lain tidak ditemukan di tempat pengekapan itu. (DI Suara Karya dikemukakan bahwa Koonel Khaerawan jadi tersangka). Di Suara Pembaharuan, Syamsu dikutip menyatakan bahwa tersangka kasus penculikan 11 orang kini di tahan.	
24 07 98	Merdeka	Danpuspom	Feisal Tanjung tidak terlibat dalam penculikan.	
	Kompas	Wiranto	Nasib 12 orang yang hilang masih diselidiki. Sementara kasum mengatakan bahwa DKP akan dipimpin oleh Pati yang bintangya lebih tinggi satu tingkat dari Pati yang diperiksa. Menurut	
			Media, Kasum mnegatakan bahwa DKP akan dipimpin perwira berbintang empat.	

27 09 98	MI	Habibie	Soal kasus penculikan diserahkan kepada ABRI, karena ABRI memiliki sistem tersendiri.	
29 08 98	MI	KONTRAS	Menelusuri laporan adanya 14 mayat di Blambangan Umpu Lampung.	
30 07 98	MI	Feisal tanjung	“Operasi itu semua di bawah Pangab, namun kalau ada hal-hal yang khusus saya tidak tahu. (KONTRAS hari itu diterima PANGAB)	
31 07 98	Kompas	Pangab	Tidak diketahui 12 orang yang masih hilang, ABRI tidak akan menggunakan kekerasan dsb.	
3 08 98	MI	Kapuspen ABRI memastikan bahwa seorang bernama Herman Hendrawan yang dicari Kontras berada di Davao. Namun keterangan ini dibantah oleh Konjen RI di Davao.		
4 08 98	Kompas	Kontras	Herman di Davao bukanlah Herman yang	

			diculik.	
4 08 98	Kompas	Pangab	Bowo, Muchdi dan chaerawan segera diperikasa DKP yang dipimpin oleh KSAD.	
6 08 97	Kompas	DKP	Periksa mako Cijantung.	
	BI	Gus Dur	DKP baik tapi belum selesai masalah. Sebaiknya melalui persidangan dulu.	
07 08 98	Sinar Pagi	Seorang petugas	Kelanjutan penemuan mayat di kepulauan seribu tanggal 17 Mei, polisi memrgoki 40 anggota Kopassus di Pulau Onrus.	
	MI	DKP	Muchdi mulai diperiksa sebelumnya Chaerawan sudah diperiksa duluan oleh DKP.	
08 09 98	Merdeka	Wiranto	Bertemu dengan Amnesty International yang menyerahkan 20 kasus orang hilang. Di dampinngi Clemnetino Aramarl dan BN Marbun.	

	Republika	Prabowo	Yusuf Hasyim dan Ahmad sumargono, menemui Prabowo hendak menghibur Prabowo.	
13 08 98	MI	DKP	Prabowo mengaku bersalah (analisis BKO) dan siap mempertanggungjawabkannya. Perintah BKO bukan dari Pangti maupun Pangab.	
15 08 98	MI	DKP	DKP kemungkinan besar akan merekomendasikan agar Prabowo, Muchdi dan Chaerawan di bawa ke Mahmil. Tapi itu semua tergantung Pangab.	
25 08 98	Kompas	Wiranto	Setelah mendapatkan masukan dari DKP, Pangab memutuskan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatan, sementara Chaerawan dan Muchdi dibebastugaskan dari jabatan struktural dari ABRI.	
26 08 98	MI	Saiful Sulun	Sanksi Unytuk prabowo	

			terlalu ringan. Sementara menurut hasnan habib, Prabowo seharusnya sudah bisa di mahmilkan. Muladi mengatakan mengingat statusnya, Parbowo bisa disidangkan di pengadilan negeri. Sahala radjagugkguk, mengatakan bahwa Feisal Tanjung jangan lepas tanggung jawab dalam kasus Prabowo.	
31 08 98	Jakarta Post	Pius	Bermaksud menuntut Prabowo ke pengadilan.	
4 09 98	Republika, MI	Keluarga Orang Hilang	Mengadakan kemah keprihatinan dan mengundang kehadiran Amien, Mega dan Gus dur juga Prabowo. Polisi Wajib mencari yang masih hilang.	
08 09 98	MI	Nayjen Syamsu Hendardi	Pisu dan Syamsu akan ke Cijantung untuk menklarifikasi lokasi	

11 09 98	Kompas	Pius	penyekapannya. Memberikan keterangan di Puspom ABRI. Sementara korban dan keluarga korban bersama Kontras menemui Amin dan Megawati. Keduanya menyatakan simpati serta menyetujui bahwa Kontras memang patut dibantu secara politk.	
14 09 98	Merdeka	Desmon, Taslam dan Andi	Menolak panggilan Puspom ABRI.	
15 09 98	MI	Kerry Brogan	Mendesak ABRI untuk sungguh-sungguh menegakan HAM dan melakukan peradilan sipil untuk pelaku penculikan.	
16 09 98	MI	Amin Rais	Di tenda keprihatinan YLBHI Amin meminta Habibie memahmilkan Prabowo.	
		Muladi	Amnesty International harus meminta ijin dari pemerintah untuk dapat melakukan penyelidikan di Indonesia.	

		Adi Andojo	Rejim harus menjelaskan secara jujur soal kasus orang hilang. Kasus ini bisa dibawa ke pengadilan Internasional.	
17 08 98	SP	Keluarga korban	Mereka ke dephankam menanyakan nasib ke 14 orang yang masih hilang, semula ingin bertemu dengan PANGAB.	

Melalui paparan peristiwa dalam tabel di atas kita dengan segera dapat menyusun semacam kronologis sederhana tentang bagaimana denyut kasus penculikan ini. Di tinjau dari sudut aktor yang terlibat, secara umum kasus ini terdiri atas beberapa fase besar:

Dalam konteks dinamik publik, usaha yang dilakukan menyangkut fase sebagai berikut:

1. Fase Pelaporan

Dalam fase ini sejumlah organ di dalam tubuh masyarakat yakni kelompok-kelompok LSM, melaporkan secara resmi hilangnya dua orang aktivis kepada aparat yang berwenang. Laporan ini menyudahi desas-desus kehilangan mereka. Dari kasus ini, sejumlah kasus penculikan kemudian juga muncul. Dalam tahap ini kasus orang hilang masih berada dalam wilayah keprihatinan yang terbatas, beredar seputar aktivis.

2. Fase Investigasi Publik dan pembongkaran pelaku.

Dengan makin besarnya jumlah laporan mengenai orang hilang, tuntutan publik untuk menuntaskan soal ini makin membesar, maka persoalan kemudian ditangani dalam bentuk-bentuk investegasi yang lebih terkoordinir, terkonsolidir dan sistematis. Dari sini persoalan bergerak dari keprihatinan sejumlah aktivis menjadi keprihatinan publik. Dari soal personal menjadi soal sosial-politik. Dalam fase pencarian, tekanan kepada pemerintah terjadi secara intens dan keras.

3. Fase penemuan kembali

Setelah investegasi berhasil membongkar peran dan pelaku penculikan, sejumlah aktivis kemudian dibebaskan. Sementara dari sudut pelaku secara khusus terpetakan fase sebagai berikut:

1. Fase Penculikan
2. Fase Pelepasan

Ini dikuatkan dengan fakta mengenai nasib mereka yang dihilangkan sebagai berikut:

Nama/Usia/Status	Fase Penculikan	Fase Pelepasan	Tentang Pelaku
Faisol Reza (25) Mahasiswa Sastra UGM	Diculik tanggal 12/3/98 pkl. 14.30 di RSCM, Jl. Diponegoro. Selama dalam penculikan tangannya diborgol, dipukuli, diinjak, injak, ditampar, dan diinterogasi persoalan politik, yakni aktivitas PRD yang dituduh berencana menggulingkan Soeharto. Ia juga ditanya tentang	Dilepas pada tanggal 25/4/98, pukul 18.00 di depan stasiun kereta api Gambi. Setelah sebelumnya diperingatkan untuk tidak memberitahu apa saja yang sudah dialami dengan membuat surat pernyataan disertai ancaman.	Menurut Faisol Reza: Operasi yang dilakukan para penculik menunjukkan keahlian khusus yang menjadi kualifikasi kerja mereka, profesional, lingkup operasi ber-skala nasional, terorganisir, didukung dana

	<p>keberadaan Andi Arief. Selama interogasi disetrum, disundut rokok, dicabuti bulu kakinya, kakinya diinjak dengan kaki meja.</p> <p>Selama di sel bertemu dengan Yani Avri dan Sony yang "dilepas" tanggal 14/3/1998, Pius, Desmon dan Jati. Menurut Soni dan Yani mereka sudah 10 bulan ditahan. Para penculik selalu berusaha mencari tahu soal keterlibatan LB Moerdani, Sofyan Wanandian JB Sumarlin. Juga kualifikasi gerakan Gus Dur, Amien Rais dan Megawati.</p>		<p>yang besar, serta mempunyai tujuan target politik tertentu.</p>
<p>Nezar Patria (28) Alumnus Filsafat UGM, Aktivistis SMID</p>	<p>Diculik tanggal 13/3/1998 pkl. 19.00 di rumah susun Klender. Selama penyekapan diinterogasi, disiksa, disterum, ditendang dan dipukuli, juga ditanya keberadaan Andi Arief, dan juga ditanyakan tentang Waluyo Jato, Faisol Reza, Herman Hendrawan, Pius dan Desmon. Ia juga disuruh bercerita tentang aktivitas mereka dan aktivitasnya sendiri. Ditanya soal pendanaan PRD/SMID oleh Sofyan Wanandi, serta soal politik PRD.</p>	<p>Proese pelepasan mulai 15/3/1998, dibawa dengan mobil kijang (setelah di tempat "X" sebelumnya diperiksa dan di-BAP), dibawa ke Polda Metro Jaya dan diperiksa lagi. Disuruh menandatangani surat penahanan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana subversi. Ditahan dan diisolasi selama sekitar 3 bulan. Hingga 5/6/1998</p>	<p>Menurut Nezar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sela disekap ciri-ciri lokasi adalah kawasan militer, karena sering mendengar derap langkah sepatu lars militer yang sedang baris berbaris • Pendulik sebanyak 6 orang berbadan tegap • Selama dalam tahanan Polda pernah dipanggil perwira dari Puspom ABRI. Mereka menanyakan proses penangkapan BAP) oleh orang-orang tak

A. Rusdianto (24) Mahasiswa dan Aktivistis SMID	Diculik tanggal 13/3/1998. Kejadian sama dan bersamaan dengan Nezar	<ul style="list-style-type: none"> • Dipisah dengan Nezar dan Mugi, lalu dibawa ke tempat yang pintunya bertuliskan Patung Marinir. • Bertemu dengan Nezar dan Mugi di Polda 	dikenal tersebut. Menurut Aan: Pagi dan sore selama penyekapan sekelompok orang di luar ruangan berlari-lari dalam derap langkah sepatu serentak diiringi nyanyian yang lantang dan tegas. Kadang terdengar suara pesawat terbang. Selebihnya sama dengan Nezar
Mugiyanto Mahasiswa	Diculik tanggal 13/3/1998 pkl. 20.00 di rumah susun Klender, lalu dibawa ke Koramil. Kemudian dengan mobil bak terbuka Polisi Militer (PM) bersama 4 orang PM dibawa ke Kodim Jakarta Timur. Di tempat "X" disiksa, dipukul, disterum pada saat diinterogasi. Ditanya soal struktur organisasi PRD, terutama soal Andi Arief dan Bimo Petrus. Suatu kali interogasi dilakukan oleh 7 orang.	15/3/1998 ke Polda Metro Jaya pkl. 16.00, diperiksa sampai pukul 21.00, dari pemeriksaan diduga melakukan tindak pidana subversi. Ditahan di sel isolasi selama 3 bulan. Tanggal 17/5 bersama Nezar dan Aan diperiksa Puspom ABRI sebagai saksi atas kasus penculikan yang terjadi terhadap mereka. Tanggal 5 juni disuruh menandatangani surat penangguhan penahanan dari Polda. Pkl. 14.00 dibebaskan	Menurut Mugiyanto: Penculik yang berjumlah lebih dari 2 orang ciri-cirinya: badan tegap, dan besar. Lokasi penyekapan ciri-cirinya sama yakni mendengar suara azan yang cukup jelas, pernah mendengar orang senam gaya militer yang dilakukan sambil meneriakkan yel-yel
Rahardjo	Diculik tanggal 12 Maret (sama	Dilepaskan tanggal 25 April, sebelumnya ia diperintahkan oleh	Penculiknya berjumlah lebih dari 2 orang, tegap dan besar.

Waluyo Jati (28) Mahasiswa UGM	dengan Faisol Reza) Indikasi akan diculik sudah dirasakan sejak 11 Maret, dengan adanya gerak-gerik dari orang tak dikenal yang selalu menguntit. Dalam penculikan ia diinterogasi sama dengan Reza	penculiknya untuk mengatakan bahwa ia diculik oleh mafia di belakang diskotik dan diperintahkan untuk menghentikan aktivitas politiknya.	Selama disekap mendengar suara ajan, dan ritme suara senam a la tentara serta yel-yel.
Andi Arif	Tanggal 28 Maret pkul 11 di culik di Toko di Lampung di bawa ke Jakrta. Di siksa selama sepuluh hari dalam sel dengan tangan terborgol. Tangal 17 April di bawa ke Polri	Tangal 24 April dilepaskan dari tahanan Polda	Di culik oleh sekitar 8 orang, diantaranya ada dua orang berseragam Polisi Militer.
Desmond Mahesa	J. Diculik pada tanggal 3 februari sekitar pukul 14.30 di depan GMKI jalanm Proklamasi. Selama diculik diinterogasi soal kegiatan politiknya di sel ia bertemu dengan Yani Afri seorang sopir, aktivis PDI Perjuangan yang dituduh merakit bom dan hendak meledakan bom di Kepala Gading.	Tanggal 3 April dilepaskan dengan diantar ke airport Cengkareng	Di tahan di sel, selama di sana ia melihat orang berseragam militer, di wilayah yang sering terdengar deru pesawat. Penculiknya sendiri dua orang yang menodongkan pistol jenis FN, berpostuer tinggi, besar.
Pius Lustrilanang	4 Feruari, selama diculik mengalami siksaan, diinterogasi terutama soal aktivitas politiknya serta keterkaitannya dengan tokoh-tokoh tertentu.	Dilepaskan 2 APRIL	Sama dengan yang menculik Desmond
Haryanto Taslam	2 maret	3 April	

Dengan sebaran data ini terlihat bahwa pelepasan dilakukan setelah masa-masa investegasi dan tekanan yang cukup kuat dari kubu publik. Dari sini, para korban yang dilepas secara terbuka mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian mitos tentang negara yang super dan legenda tentang betapa agungnya kultur militer di Indonesia perlahan-perlahan terbuka.

Sementara itu, dari sudut institusi negara, secara umum terlihat beberapa proses yang variatif dari unsur-unsur yang jug avariatif:

1. Fase Menolak

Dalam fase ini sejumlah unsur resmi dalam negara mengajukan argumentasi dan sikap yang sangat dingin, bahkan cenderung cucui tangan. Hal ini bisa dilihat dari sikap mantan Mendagri Hartono dan Mantan Kapuspen Abdul Wahab Mokodongan.

2. Fase Mendengar

Dengan tuntutan dari masyarakat yang kian luas, mau tak mau unsur-unsur dalam negara mendengar soal penculikan ini. Namun sikap mereka masih sangat hati-hati.

3. Fase Pencarian data

Di sini mereka membentuk TPF, terutama setelah Pius, Desmon dan Taslam dibebaskan.

4. Fase solusi politik

Setelah data diperoleh dan tekanan publik makin mengarah kepada keterlibatan elit Kopassus, pemerintah membentuk DKP yang menyidangkan Prabowo, Muchdi dan Chaerawan.

5. Fase solusi hukum.

Prabowo dipensiunkan secara terhormat, Muchdi dan Chaerawan di bebastugaskan dari jabatan apapun dalam struktur ABRI, 10 orang anggota Kopassus disidangkan dalam pengadilan militer.

Dalam keseluruhan proses itu kita melihat dinamika puncak sebagai berikut:

Bagan Relasi Negara-Publik dalam Kasus Penculikan

	Dinamika Publik	Respon Negara
	Melaporkan Secara Resmi Kepada aparat	Menolak
	Mengumumkan secara terbuka	Menolak
	Laporan Publik mengenai kasus penculikan semakin meluas	Muncul respon dari lembaga semi otonom negara dan respon dari aparat militer,
	Tekanan untuk membongkar kasus ini terutama kepada militer makin kuat	Unsur militer seperti Hartono dan Mokodongan menolak dan bersikap sinis.
	Kembalinya Taslam, Pius dan Desmond, serta korban yang lain	ABRI membentuk TPF, sekitar 43 orang termasuk sipil diperiksa.
	Teridentifikasinya pelaku penculikan sebagai unsur tertentu dalam Angkatan darat	Dibentuk DKP
SOLUSI AKHIR		Prabowo Dipensiunkan secara terhormat
		Danjen Kopassus dan Kolonel Chaerawan dibebastugaskan dari seluruh tanggung jawab dalam militer
		11 Orang anggota kopassus disidangkan

Bab III Analisa

Dengan merekonstruksi kembali seluruh kejadian penculikan itu, maka kita melihat bahwa ujung dari semua ini seolah sudah dituntaskan dengan "memecat" Prabowo, dan menyidangkan 11 orang anggota Kopassus lainnya. Apakah ini adil? Untuk menilainya kita perlu melihat dulu bobot atau makna sosi-politik dalam tragedi penculikan, baru kemudian kita bisa membandingkan dan memberikan penilaian. Mengenai bobot itu kita bisa mengungkap hal-hal sebagai berikut:

Pertama, sebagian besar dari mereka yang diculik adalah subyek-subyek yang berada dalam atmosfer politik tertentu: yakni aktivis pemuda dengan derajat keterlibatan dan intensitasnya masing-masing terhadap gerakan politik yang digeluti oleh masing-masing. Yang jelas dalam atmosfer itu, sebagian besar berada dalam kubu yang non status quo.

Kedua, rangkaian penculikan yang menonjol secara politis berada dalam wilayah waktu di mana rezim politik yang berkuasa tengah akan menghadapi masalah krusial mengenai keabsahan dan kelanjutan kekuasaan, yakni sidang umum.

Ketiga, secara struktural rezim itu sendiri tengah menghadapi krisis yang multidimensi setelah ekonomi yang amkin terpuruk dan kepercayaan masyarakat yang menurun.

Keempat, dalam situasi krisis yang multidimensional itu, telah tumbuh juga gerakan masyarakat untuk menentang pemerintahan yang ada secara terbuka, masiv dan kontinyu yakni melalui gerakan mahasiswa.

Kelima, dalam kondisi demikian maka tidak dapat dipungkiri bahwa tengah terjadi konflik yang cukup manifes baik dalam tubuh negara sendiri maupun antara unsur-unsur masyarakat dengan unsur dalam negara, respon negara yang tergambar dalam bagian di atas memperjelas situasi ini..

Dengan demikian secara sederhana bisa disimpulkan bahwa kasus penculikan itu sendiri terjadi di dalam kondisi di mana rezim yang berkuasa tengah berada dalam situasi yang paling sensitif untuk mempertahankan kekuasaannya, sementara masyarakat tengah memasuki wilayah yang paling hangat untuk meminta perubahan dalam kekuasaan. Kenyataan ini secara aklamasi ditutup dan diafirmasi dengan fakta bahwa seiring dengan mundurnya Suharto, maka kesalahan dalam penculikan secara resmi dijatuhkan ke atas pundak Let.Jen Prabowo Subianto.

Dengan demikian diakui atau tidak, haru diperhitungkan fakta yakni bahwa situasi reformasi atau jatuhnya Suharto turut serta mendorong dibawanya Prabowo sebagai pelaku utama penculikan. Hanya sayangnya, reformasi itu hanya menyeret Prabowo tapi tidak mampu menjelaskan di mana ke empat belas orang yang masih hilang.

Dari sini kita kembali dapat mengajukan pertanyaan: pertama, kalau penculikan itu berhubungan dengan upaya mempertahankan status quo, maka tidak dapat tidak secara politik pertanggung jawaban kasus itu tidak dapat secara parsial diletakan di atas pundak Prabowo semata melainkan juga kepada seluruh pendukung Suharto pada waktu itu. Artinya secara moral politik, seluruh pejabat lainnya tidak lebih baik dan lebih bersih dari Prabowo. Artinya, kalau hanya peradilan dan sanksi terhadap Prabowo, Muchdi serta Chaerawan, sebenarnya tidak cukup layak untuk memenuhi unsur-unsur keadilan dalam masyarakat, mengingat yang harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung tidak hanya mereka.

Bab IV Kesimpulan dan Seruan

Berdasarkan analisis di atas maka, mengenai kasus penculikan ini KONTRAS menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, penculikan terhadap aktivis harus dilihat sebagai bagian dari upaya status quo untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian secara etik politik di hadapan nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan, penanggung jawab persoalan ini tidak dapat diletakkan dalam punggung Prabowo, Chaerawn dan Muchdi serta 11 anggota Kopassus semata, melainkan termasuk seluruh pendukung status quo semasa akhir jabatan Suharto.

Kedua, secara kenegaraan, tidak dapat tidak, sebagaimana prinsip-prinsip dalam hirarkhi kekuasaan yang berlaku di Indonesia, pertanggung jawaban hukum resmi dari setiap bawahan dalam militer –apalagi untuk militer tingkat tinggi- harus dilihat sebagai bagian dari hubungan hirarki kekuasaan, dengan demikian –minimal secara politik- seluruh pejabat militer yang langsung berada di atas Prabowo harus ikut bertanggung jawab terhadap kasus penculikan ini.

Ketiga, secara hukum, telah terbukti dari kesaksian sebagian besar saksi, bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam penculikan meliputi berbagai institusi dalam militer seperti unsur BIA, unsur Kodam Jaya, dan unsur dalam Kepolisian. Dengan demikian kepada mereka pun secara hukum patut dikenakan proses yang semestinya.

Keempat, pasca jatuhnya Suharto, secara aklamasi rezim yang baru mendefinisikan sebagai rezim refromasi yang berbeda dengan rezim Suharto. Dengan demikian secara moral dan politik rezim ini berkewajiban untuk bersikap kontras terhadap sikap dan watak pendahulunya, salah satu urusan besar yang perlu dilakukan dalam rangka membuktikan itu semua adalah dengan menegakan hukum dan mengembalikan mereka yang masih disimpan oleh penculik hidup atau pun mati.

Dengan kesimpulan-kesimpulan ini maka KONTRAS menuntut kepada pemerintah sebagai berikut :

1. Sebagai warisan pemerintahan Suharto, Presiden dan Panglima ABRI harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas keterlibatan mereka sebagai pendukung status quo selama Suharto berkuasa.
2. Meminta pemerintah untuk secara lengkap dan utuh mengumumkan hasil temuan-temuan DKP kepada publik.
3. Secara hukum, Pangti dan Pangab harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus penculikan.

4. Memahmilkan Prabowo, May.jen Muchdi, Kolonel Chaerawan serta ketua BIA, Koops Jaya dan WaKoops Jaya sebagai penanggung jawab keamanan dan operasi militer di ibu kota.

Jakarta, 21 Desember 1998

Koordinator KONTRAS

MUNIR